BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber- sumber daya yang dimilikinya. Sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (untuk selanjutnya disingkat menjadi PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran PAD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan faktor penentu tingkat PAD. Apabila PAD meningkat dari tahun ke tahun, maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana transfer dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka.

Melihat struktur pendapatan daerah saat ini, sumber pendapatan Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh dana perimbangan dari pusat.

Ketergantungan daerah akan dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, untuk itu optimalisasi PAD diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memecah ketergantungan akan dana transfer. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dari keempat sumber PAD tersebut, Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan daerah yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah Tingkat I yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam

diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Jenis pajak daerah tingkat I yang besar pengaruhnya terhadap pemasukankas daerah dan memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dari standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat menjadi PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disingkat menjadi BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Pada saat ini perkembangan objek BBNKB terus mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin banyaknya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bekas. BBNKB merupakan pajak yang sumbangannya relatif potensial terhadap penerimaan PAD, maka pajak yang potensial tersebut harus terus digali,

untuk meningkatkan sumbangan penerimaan pajak untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Pengenaan PKB dan BBNKB dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 sampai 15. Penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud.

Keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah obyek kendaraan bermotor dan PAD menjadikan salah satu yang saling mempengaruhi. Semakin besar potensi dan realisasi PKB maka akan semakin besar pula mempengaruhi jumlah penerimaan PAD, tidak terkecuali Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terus berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Daya tarik sektor industri di Kepulauan Riau mendorong banyaknya imigran yang masuk yang bertujuan mendapatkan pekerjaan yang menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kepulauan Riau dari tahun 2010 berjumlah 1.692.816 jiwa berkembang menjadi 2.028.169 jiwa ditahun 2016 (Sumber BPS). Seiring dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Jumlah kendaraan bermotor di

Kepulauan Riau tahun 2010 berjumlah 753.451 unit dan pada tahun 2013 berkembang menjadi 1.068.364 unit (sumber Dishub). Dengan demikian maka adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor ditengah masyarakat akan memberikan dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak khususnya PKB dan BBNKB.

Penelitian tentang kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2014) dalam jurnal “Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasipenerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi target dan termasuk dalam kategori yang sangat efektif.

Ratnasari (2016) dalam jurnal “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan menggunakan metode eksplanatif yang menjelaskan sebab akibat antara variabel terikat dan variabel bebas. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data panel, yang dilaksanakan pada 12 kantor UPTD samsat se- Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian initerdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor,

PDRB perkapita, mutasi kendaraan masuk, tunggakan pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat besarnya kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, yang pada akhirnya mempengaruhi total pendapatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi, diperlukan optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak daerah.
- b. Seberapa besar PKB dan BBNKB tersebut akan memberikan kontribusi terhadap PAD.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya membatasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas PKB, BBNKB dan PAD
- b. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada tahun 2010 sampai 2015.
- c. Objek penelitian PKB, BBNKB dan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?
2. Bagaimana kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kontribusi PKB terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.
2. Menganalisis kontribusi BBNKB terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.
3. Menganalisis kontribusi PKB dan BBNKB secara bersama-sama terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 hingga tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Pemerintah dan Pihak Yang Terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam di masa yang akan datang.

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi dan menambah wawasan yang membaca hasil penelitian ini.
4. Bagi mahasiswa Universitas Putra Batam, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan peneliti lain baik mahasiswa UPB sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak khususnya di Universitas Putera Batam.